

KEBIJAKAN ASESMEN KOMPETENSI MINIMUM

Siti Solekha¹, Purwati² Nurkolis³

Email : soledath77@gmail.com, purwati.806@admin.sd.belajar.id, nukolis@upgris.ac.id

¹²³Magister Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam sistem pendidikan Indonesia. AKM, yang menggantikan Ujian Nasional, merupakan paradigma baru dalam evaluasi pendidikan yang berfokus pada literasi, numerasi, dan karakter. Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui evaluasi kemampuan dasar siswa. AKM difokuskan pada pengukuran kemampuan literasi dan numerasi yang dianggap penting untuk mendukung pembelajaran siswa di tingkat selanjutnya. Artikel ini membahas latar belakang diterapkannya AKM, tujuan utama dari kebijakan ini, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai sekolah di Indonesia. Melalui beberapa pendekatan, artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas AKM, termasuk kesiapan sekolah, tenaga pendidik, serta dukungan teknologi dan infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa AKM memiliki potensi untuk menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan, namun keberhasilannya sangat tergantung pada pelatihan guru, penyediaan sarana pembelajaran yang memadai, dan pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan evaluasi yang tidak sekadar bersifat administratif. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti kesenjangan infrastruktur teknologi dan kebutuhan pelatihan guru. Tulisan ini memberikan rekomendasi untuk optimalisasi kebijakan AKM agar sejalan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21.

Kata Kunci : Kebijakan, Asesmen, Kompetensi Minimum

Abstract

This research examines the implementation of the Minimum Competency Assessment Policy (AKM) in the Indonesian education system. AKM, which replaces the National Examination, is a new paradigm in educational evaluation that focuses on literacy, numeracy and character. The Minimum Competency Assessment (AKM) policy is part of the Indonesian government's efforts to improve the quality of education through evaluating students' basic abilities. AKM is focused on measuring literacy and numeracy skills which are considered important to support student learning at the next level. This article discusses the background to the implementation of AKM, the main objectives of this policy, as well as the challenges faced in its implementation in various schools in Indonesia. Through several approaches, this article identifies factors that influence the effectiveness of AKM, including school readiness, teaching staff, and technology and infrastructure support. The results of this research show that AKM has the potential to be an important instrument in improving the quality of education, but its success is very dependent on teacher training, the provision of adequate learning facilities, and a comprehensive understanding of the purpose of evaluation which is not merely administrative in nature. However, implementation faces challenges such as technological infrastructure gaps and teacher training needs. This article provides recommendations for optimizing AKM policies so that they are in line with 21st century educational needs.

Keywords : Policy, Assessment, Minimum Competence

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing ditingkat global. Dalam UU RI No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dimana pada Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Salirawati, 2021). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, evaluasi terhadap proses dan hasil belajar menjadi komponen krusial dalam sistem pendidikan (Widodo, 2021). Di Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya melalui kebijakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) (Asrijanty, 2020). Kebijakan ini diperkenalkan sebagai bagian dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan tujuan menilai kemampuan dasar siswa dalam literasi, numerasi, serta karakter. Salah satu evaluasi pendidikan yang sangat baru di Indonesia adalah Asesmen Nasional. Ini terdiri dari tiga komponen: Asesmen Kompetensi minimum (AKM), survey karakter, dan lingkungan belajar. AKM mengukur hasil belajar kognitif, seperti kemampuan membaca dan numerasi (Fadilatussyifa & Setyaningsih, 2023). Lingkungan belajar mengukur hasil belajar emosional dalam profil siswa pancasila, sehingga siswa Indonesia memiliki kompetensi global. Semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, dan peserta didik, berpartisipasi dalam survei lingkungan belajar setelah penilaian dan evaluasi kompetensi siswa. Survei lingkungan belajar dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan sekolah saat ini (Hasanah & Hakim, 2021).

Sistem pendidikan Indonesia telah lama menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa (Mansir, 2022). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara kompetensi yang diharapkan dengan pencapaian aktual siswa. Hasil survei internasional seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*) menunjukkan bahwa kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pendidikan nasional

Ujian Nasional, atau UN, adalah alat evaluasi yang dilakukan secara bersamaan di seluruh Indonesia dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas dan sederajat. Tujuan pemerintah untuk menerapkan program evaluasi tingkat nasional ini adalah untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki standar penilaian yang memenuhi standar nasional. (Ghani & Zharfa, 2020). AKM berbeda dengan model penilaian sebelumnya, seperti Ujian Nasional (UN), karena tidak berfokus pada penguasaan materi pelajaran, melainkan pada kemampuan esensial yang mendasari pembelajaran di berbagai disiplin ilmu. Literasi dan numerasi dipilih sebagai fokus utama karena kedua kemampuan ini merupakan pondasi penting bagi keberhasilan siswa dalam memahami dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi berarti tidak hanya dapat membaca, tetapi juga dapat menganalisis dan memahami ide-ide di balik tulisan. Namun, kompetensi numerasi mengacu pada kemampuan untuk menganalisis data dengan benar. Dua hal ini akan menyederhanakan penilaian kompetensi minimal yang akan dimulai tahun 2021, yang tidak lagi bergantung pada pengetahuan materi atau mata pelajaran. Numerasi dan literasi adalah kompetensi dasar yang dibutuhkan siswa untuk belajar. (Muliantara & Suarni, 2022). Dengan mengukur kemampuan literasi dan numerasi, AKM diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemampuan siswa yang sesungguhnya, sehingga dapat menjadi landasan bagi perbaikan pembelajaran di sekolah.

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan terkait evaluasi pendidikan di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemahaman komprehensif tentang efektivitas kebijakan asesmen nasional dalam meningkatkan kompetensi minimum siswa (Aprilyanti et al., 2024). Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada analisis hasil ujian nasional atau implementasi kurikulum, namun belum ada kajian mendalam yang mengintegrasikan perspektif kebijakan asesmen kompetensi minimum dengan

dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Namun, implementasi kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Berbagai faktor, seperti kesiapan guru, sarana dan prasarana di sekolah, serta perbedaan tingkat akses terhadap teknologi, menjadi hambatan dalam pelaksanaannya (Zakso, 2023). Selain itu, pemahaman yang benar tentang tujuan AKM di kalangan tenaga pendidik dan masyarakat juga mempengaruhi efektivitas dari kebijakan ini (Iman et al., 2021). Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan AKM menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan optimal, sesuai dengan tujuan awalnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tulisan pada artikel ini akan membahas lebih lanjut tentang latar belakang kebijakan AKM, pelaksanaannya di lapangan, serta tantangan yang dihadapi. Selain itu, akan disajikan analisis mengenai dampak dari kebijakan ini terhadap proses pembelajaran dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dioptimalkan di masa depan.

Implementasi Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem evaluasi pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kompetensi dasar siswa dalam literasi, numerasi, dan karakter. Urgensi dari penelitian tentang kebijakan AKM ini terletak pada beberapa diantaranya Transformasi paradigma: AKM mengubah fokus evaluasi dari penguasaan konten mata pelajaran menjadi kemampuan berpikir tingkat tinggi dan penerapan pengetahuan dalam konteks kehidupan nyata, serta Pemetaan kualitas pendidikan: Hasil AKM dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kualitas pendidikan di berbagai daerah di Indonesia, memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran.

METODE

Metode literature review digunakan dalam penyusunan artikel ini. Literature review adalah suatu pendekatan metodologis dalam penelitian yang melibatkan proses pengumpulan dan penilaian kritis terhadap berbagai studi terdahulu yang berkaitan dengan suatu topik spesifik. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan guna memberikan pemahaman komprehensif tentang subjek yang diteliti. (Triandini et al., 2019) yang bertujuan untuk menganalisis dan merangkum hasil penelitian, laporan kebijakan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan kebijakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep, tujuan, dan implementasi AKM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaannya. Tahapan penelitian literatur dilakukan melalui beberapa langkah berikut: 1) Pencarian Literatur: Literatur yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan artikel dari situs resmi pemerintah serta lembaga pendidikan. Sumber-sumber yang relevan diidentifikasi menggunakan kata kunci seperti "Asesmen Kompetensi Minimal", "AKM", "kebijakan pendidikan Indonesia", "literasi dan numerasi", dan "evaluasi pendidikan". Pencarian dilakukan melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, SpringerLink, dan database nasional seperti Garuda. 2) Kriteria Inklusi dan Eksklusi: Artikel dan laporan yang diikutsertakan dalam kajian ini harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu: Berfokus pada evaluasi kebijakan AKM di Indonesia atau sistem asesmen yang sejenis di negara lain, Dipublikasikan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir untuk memastikan relevansi dengan konteks kebijakan terkini, Bersumber dari institusi yang kredibel, seperti jurnal ilmiah terakreditasi, laporan pemerintah, atau organisasi internasional yang berkaitan dengan pendidikan.

PEMBAHASAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia menginisiasi program Merdeka Belajar sebagai bagian dari upaya pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu komponen utama dari inisiatif ini adalah Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM). Konsep Merdeka Belajar menekankan kebebasan dalam proses pembelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman, tanpa tekanan, dan sesuai dengan minat serta bakat alami mereka. Pendekatan ini bertujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan santai, sambil tetap memperhatikan pengembangan portofolio yang selaras dengan kegemaran masing-masing peserta didik (Zidni Ilman Nafi'a et al., 2021).

Implementasi Merdeka Belajar juga merupakan respons terhadap penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, baik dalam hal layanan maupun kompetensi lulusan. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan pendidikan Indonesia dalam menghadapi tuntutan pasar kerja di era Industri 4.0 dan Society 5.0. (Sudarma, 2021) (Shofia Hattarina et al., 2022). Berbeda dengan evaluasi pendidikan sebelumnya, seperti Ujian Nasional (UN), AKM berfokus pada pengukuran kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi. Literasi di sini tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi dari berbagai jenis teks, sedangkan numerasi mencakup kemampuan berpikir logis dan menggunakan angka dalam memecahkan masalah sehari-hari. Dalam pembahasan ini, beberapa aspek penting dari AKM akan dianalisis, termasuk tujuan kebijakan, implementasi di lapangan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Tujuan Kebijakan AKM

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu langkah strategis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pengambilan kebijakan di bidang pendidikan menjadi sangat krusial. Pendidikan, sebagai sektor publik yang vital, memerlukan pengelolaan yang serius dan ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Terlebih lagi, di tengah pesatnya arus globalisasi saat ini, sistem pendidikan dituntut untuk dapat beradaptasi dan melakukan berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. (Norfika Yulindari & Hadi, 2020). Tujuan utama AKM adalah mengukur kemampuan esensial yang diperlukan siswa untuk sukses dalam pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari. AKM tidak mengukur kemampuan hafalan atau penguasaan mata pelajaran spesifik, melainkan kemampuan yang lebih universal dan aplikatif. Kebijakan ini diharapkan dapat: Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya kemampuan dasar siswa di tingkat sekolah dasar dan menengah, Meningkatkan fokus pada pembelajaran yang lebih bermakna, di mana siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal materi, tetapi memahami dan menerapkan konsep-konsep penting dalam literasi dan numerasi, serta Mendorong guru dan sekolah untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga hasil asesmen dapat digunakan sebagai alat untuk perbaikan pembelajaran.

AKM juga memiliki tujuan penting dalam memberikan umpan balik yang konstruktif kepada berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Bagi siswa dan orang tua, hasil AKM dapat memberikan gambaran jelas tentang kekuatan dan area pengembangan siswa. Bagi guru, informasi ini menjadi landasan untuk merancang intervensi pembelajaran yang tepat sasaran. Sementara bagi pembuat kebijakan, AKM menyediakan data berharga untuk memetakan mutu pendidikan nasional, mengidentifikasi disparitas antar daerah, dan merumuskan kebijakan pendidikan berbasis bukti. (Rohim, 2021). Tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, AKM juga memiliki tujuan penting dalam pengembangan karakter dan kompetensi sosial-emosional siswa. Kebijakan ini berupaya mengevaluasi perkembangan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengukur keterampilan sosial-emosional yang krusial untuk kesuksesan di masa depan. Dengan demikian, AKM mendorong sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter yang holistik (Fadilatussyifa & Setyaningsih, 2023)

Implementasi AKM di Lapangan

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, AKM diimplementasikan secara bertahap di seluruh sekolah di Indonesia. Pelaksanaan AKM dilakukan melalui dua jalur, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dan survei karakter yang bertujuan untuk mengukur aspek non-kognitif siswa. Implementasi Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) dengan menggunakan komputer pribadi merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang selama ini sering terjadi dalam pelaksanaan asesmen nasional, termasuk Ujian Nasional (UN). Metode ini dirancang untuk meminimalisir resiko kebocoran soal dan tindak kecurangan yang seringkali muncul ketika asesmen dilakukan dengan sistem berbasis kertas. Selain itu, penggunaan teknologi komputer dalam AKM juga bertujuan untuk mengefisienkan proses distribusi soal, yang sebelumnya dikenal rumit dan memakan

waktu lama. Dengan demikian, pendekatan berbasis komputer ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan efektivitas pelaksanaan asesmen secara keseluruhan. (Barokah et al., 2021). Pada ANBK dilaksanakan untuk siswa kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Hasil asesmen ini tidak hanya digunakan untuk menilai kemampuan individu siswa, tetapi juga untuk mengevaluasi kondisi sekolah secara keseluruhan, seperti kualitas lingkungan belajar, efektivitas pengajaran, dan akses terhadap fasilitas pendidikan. Efektivitas suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan para pelaksananya, tetapi lebih ditekankan pada dampak atau konsekuensi yang dihasilkan terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Contohnya, pergantian Ujian Nasional dengan Asesmen Nasional bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di seluruh institusi pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, serta menjadi instrumen penyetaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: Apakah implementasi Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) mampu secara efektif menyelesaikan permasalahan mendasar yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Atau, apakah ini hanya merupakan program serupa Ujian Nasional yang menghabiskan anggaran besar namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan? (Hetu Aisah et al., 2021).

Meskipun secara konsep AKM berpotensi memberikan dampak positif, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala, seperti: *Kesenjangan infrastruktur*: Banyak sekolah di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses internet dan perangkat teknologi yang diperlukan untuk ANBK. Hal ini mengakibatkan disparitas dalam pelaksanaan AKM antara sekolah di kota besar dan di wilayah pedesaan. *Kesiapan guru*: Sebagian besar guru belum sepenuhnya memahami tujuan dan metode AKM, sehingga banyak yang merasa kesulitan dalam menyesuaikan metode pengajaran mereka agar selaras dengan kebijakan ini. Selain itu, pelatihan untuk guru terkait AKM masih terbatas di beberapa daerah. *Adaptasi siswa*: Siswa, terutama di tingkat SD, mungkin belum terbiasa dengan format AKM yang berbasis komputer, sehingga bisa mempengaruhi hasil asesmen mereka. Perbedaan akses terhadap teknologi juga memperbesar kesenjangan ini (Wibowo, 2022).

Tantangan Implementasi AKM

AKM digunakan untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Penilaian dimulai pada kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Siswa diuji dengan model soal yang beragam, termasuk pilihan ganda (PG), pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selain itu, hasilnya hanya terdiri dari sekelompok kecil siswa, sekitar tiga puluh hingga empat puluh lima siswa, yang dikenal sebagai adaptif. Siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan berpikir kritis yang luar biasa untuk menjawab soal yang dibuat. Soal-soal ini diadaptasi dari Program Penilaian Siswa Internasional (PISA) untuk literasi membaca dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) untuk literasi numerik, keduanya merupakan ujian tingkat internasional atau Higher Order Thinking Skills (HOTS) (Amalia et al., 2021) (putri halimaini, asnil aidah ritonga, 2023). Selain kendala teknis, AKM juga menghadapi tantangan konseptual dan struktural. Di antaranya: 1) Perubahan paradigma evaluasi: Perubahan dari Ujian Nasional yang bersifat menguji penguasaan materi ke AKM yang lebih menekankan pada kemampuan dasar menuntut adanya perubahan paradigma di kalangan tenaga pendidik dan orang tua. Banyak yang masih menganggap penilaian pendidikan harus didasarkan pada hasil ujian berbasis mata pelajaran. 2) Keterbatasan data longitudinal: Karena AKM baru mulai dilaksanakan, belum ada cukup data longitudinal untuk melihat apakah kebijakan ini benar-benar membawa dampak jangka panjang dalam perbaikan kualitas pendidikan. Perlu waktu dan pengumpulan data yang konsisten untuk mengukur efektivitas AKM dalam memperbaiki hasil belajar siswa.

Tantangan utama dalam implementasi AKM adalah kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah di Indonesia. AKM dirancang sebagai asesmen berbasis komputer, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih kekurangan fasilitas komputer dan akses internet yang memadai. Ketidakmerataan ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pelaksanaan AKM, di mana sekolah-sekolah di daerah urban dengan fasilitas lebih baik mungkin memiliki keunggulan dibandingkan sekolah-sekolah di daerah rural atau terpencil (Sinyanyuri et al., 2022). Tantangan berikutnya berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga pendidik. AKM memerlukan perubahan signifikan dalam metode pengajaran dan penilaian, yang

menuntut guru untuk beradaptasi dengan cepat. Banyak guru, terutama yang telah lama mengajar dengan metode konvensional, mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pendekatan mereka untuk memenuhi tuntutan AKM. Pelatihan dan pengembangan profesional yang intensif diperlukan, namun pelaksanaannya di skala nasional merupakan tugas yang tidak mudah, mengingat jumlah guru yang besar dan tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.

Dampak Kebijakan AKM

Meskipun menghadapi banyak tantangan, kebijakan AKM memiliki beberapa dampak positif yang mulai terlihat. Pertama, AKM mendorong guru untuk lebih fokus pada pengajaran yang berbasis kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, dibandingkan dengan metode pembelajaran yang berorientasi pada hafalan. Kedua, hasil AKM dapat digunakan sebagai data dasar untuk menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dan dukungan bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal. Di sisi lain, dampak AKM terhadap siswa sangat bergantung pada kesiapan sekolah dan guru dalam menjalankan kebijakan ini. Tanpa dukungan infrastruktur dan pelatihan yang memadai, AKM bisa berisiko memperbesar kesenjangan pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Perubahan paradigma dalam kegiatan pembelajaran pasti disebabkan oleh penerapan penilaian nasional. Pemosisian asesmen dan literasi adalah dua topik utama dalam perubahan paradigma ini. Asesmen Nasional sekarang menggunakan angka untuk menilai hasil belajar siswa, tidak lebih dari alat untuk mengukur kemampuan siswa (kognitif dan perilaku) dan kualitas lingkungan belajar (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia). Literasi bukan lagi tujuan atau pencapaian pembelajaran; sebaliknya, itu adalah alat yang dapat digunakan siswa untuk mencapai dan menguasai kompetensi. (Wibowo, 2022).

Rekomendasi untuk Optimalisasi AKM

Agar kebijakan AKM dapat diimplementasikan secara lebih efektif, beberapa rekomendasi dapat diberikan antara lain: a) Peningkatan pelatihan guru: Guru perlu mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam terkait tujuan, metode, dan interpretasi hasil AKM agar mereka dapat menggunakannya sebagai alat evaluasi dan perbaikan pembelajaran di kelas. b) Pemerataan infrastruktur teknologi: Pemerintah perlu fokus pada penyediaan akses internet dan perangkat komputer yang memadai di seluruh sekolah, terutama di daerah terpencil, agar semua siswa dapat mengikuti AKM dengan kesempatan yang sama. c) Pendekatan adaptif bagi siswa: Mengingat bahwa AKM berbasis komputer mungkin menjadi tantangan bagi siswa yang belum terbiasa, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan siswa memiliki akses dan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri menghadapi format asesmen ini. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut, kebijakan AKM memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Rahmania, 2021).

SIMPULAN

Kebijakan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem evaluasi pendidikan di Indonesia. AKM bertujuan untuk mengukur kemampuan dasar siswa dalam literasi dan numerasi, yang dianggap esensial untuk mendukung keberhasilan mereka di tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui AKM, pemerintah berupaya menciptakan evaluasi yang tidak hanya fokus pada penguasaan materi, tetapi lebih pada kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep yang mendalam. Meskipun memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan, implementasi AKM di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan akses infrastruktur, kesiapan guru, serta kesenjangan teknologi di berbagai daerah. Namun demikian, AKM juga membuka peluang baru untuk merancang kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data evaluasi yang komprehensif. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Dengan dukungan yang memadai, AKM dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan global.

Saran yang dapat disampaikan pada artikel ini antara lain: 1) Penguatan Pelatihan Guru: Pemerintah perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan guru terkait pelaksanaan AKM, khususnya dalam hal pemahaman tujuan, penggunaan hasil asesmen, dan strategi pengajaran yang lebih relevan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Pelatihan ini harus menjangkau guru di seluruh daerah, termasuk yang berada di wilayah terpencil. 2) Pemerataan Infrastruktur Teknologi: Untuk mendukung keberhasilan AKM berbasis komputer, perlu adanya pemerataan infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Akses internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai menjadi syarat utama agar seluruh siswa dapat mengikuti asesmen dengan baik. 3) Penyesuaian Metode Asesmen: Mengingat siswa memiliki latar belakang yang beragam, terutama dalam hal akses teknologi dan kesiapan belajar, metode AKM perlu lebih adaptif. Misalnya, dengan memberikan waktu yang lebih fleksibel bagi siswa yang memiliki keterbatasan akses atau menyediakan dukungan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus. 4) Pengembangan Data Longitudinal.

Pemerintah sebaiknya terus mengembangkan sistem pengumpulan data longitudinal dari hasil AKM untuk memantau perkembangan siswa secara berkelanjutan. Data ini akan sangat berguna dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran. 5) Sosialisasi yang Intensif: Sosialisasi mengenai pentingnya AKM harus terus ditingkatkan, tidak hanya kepada guru, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat luas. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dapat mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang berbasis kemampuan esensial. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan AKM dapat dioptimalkan dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aprilyanti, S., Asbari, M., Supriyanti, A., & Fadilah, I. A. (2024). Catatan Pendidikan Indonesia: Evaluasi, Solusi, & Ekspektasi. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*.
- Asrijanty. (2020). Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan implikasinya pada pembelajaran. In *Pusat Asesmen Dan Pembelajaran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Barokah, N., Mardiana, R., & ... (2021). Implementasi Penggunaan Komputer sebagai Alternatif Media Pembelajaran terhadap Peningkatan Kesiapan Tes AKM bagi Kelas 5 Tingkat Sekolah Dasar atau Sederajat. *SEMAI: Seminar ...*, 1, 143–161.
- Fadilatussyifa, Z., & Setyaningsih, N. (2023). Analisis keterampilan metakognisi siswa dalam memecahkan masalah Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) ditinjau dari gaya kognitif. *Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika*. <https://doi.org/10.33654/math.v9i2.2163>
- Ghani, S., & Zharfa, M. (2020). Pengaruh Penghapusan Ujian Nasional Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Masa Pandemi. *Jurnal Pendidikan Tematik*, 1(3), 184–196.
- Hasanah, M., & Hakim, T. F. L. (2021). Analisis Kebijakan Pemerintah Pada Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Sebagai Bentuk Perubahan Ujian Nasional (UN). *Irsyaduna: Jurnal Studi ...*, 1(3), 252–260.
- Heti Aisah, Qiqi Yulianti Zaqiah, & A. Supiana. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM). *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128–135. <https://doi.org/10.69775/jpia.v1i2.25>
- Iman, N., Usman, N., & Bahrin, B. (2021). Implementasi Kebijakan Sekolah Dasar dalam Menghadapi Asesmen Kompetensi Minimum. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i2.14464>
- Mansir, F. (2022). TANTANGAN DAN ANCAMAN ANAK INDONESIA: POTRET PENDIDIKAN NASIONAL ERA DIGITAL. *PAUDIA : Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.26877/paudia.v11i1.9990>
- Muliantara, I. K., & Suarni, N. K. (2022). Strategi Memperkuat Literasi dan Numerasi untuk Mendukung Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4847–4855. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2847>
- Norfika Yuliandari, R., & Hadi, S. (2020). Implikasi Asesmen Kompetensi Minimum Dan Survei

- Karakter Terhadap Pengelolaan Pembelajaran SD. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 194–205.
- putri halimaini, asnil aidah ritonga, mohammad al farabi. (2023). Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies. *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(1), 52–63.
- Rahmania, L. A. (2021). Optimalisasi Gerakan Literasi Sekolah dalam Persiapan Asesmen Nasional. *JoLLA: Journal of Language, Literature, and Arts*. <https://doi.org/10.17977/um064v1i42021p450-461>
- Rohim, D. C. (2021). Konsep Asesmen Kompetensi Minimum untuk Meningkatkan Kemampuan Literasi Numerasi Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal VARIDIKA*. <https://doi.org/10.23917/varidika.v33i1.14993>
- Salirawati, D. (2021). Identifikasi Problematika Evaluasi Pendidikan Karakter di Sekolah. *Jurnal Sains Dan Edukasi Sains*, 4(1), 17–27. <https://doi.org/10.24246/juses.v4i1p17-27>
- Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenta Faradila, Dita Refani Putri, & RR.Ghina Ayu Putri. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1, 181–192.
- Sinyanyuri, S., Utomo, E., Sumantri, M. S., & Iasha, V. (2022). Literasi Sains dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM): Integrasi Bahasa dalam Pendidikan Sains. *Jurnal Basicedu*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i1.2286>
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Wibowo, A. M. (2022). Pergeseran Paradigma Pembelajaran: Analisis Dampak Penerapan Asesmen Nasional Dalam Bingkai Teori Kognitif Sosial. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 14(2), 137–152. <https://doi.org/10.18860/mad.v14i2.16023>
- Widodo, H. (2021). Evaluasi pendidikan. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Zakso, A. (2023). IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.65142>
- Zidni Ilman Nafi'a, M., Kuswandi, D., Kurniawari, C., & Aulia, F. (2021). Konsep Merdeka Belajar dalam Perspektif Filsafat Pendidikan. *SNASTEP: Pemberdayaan Teknologi Pembelajaran Dalam Tatanan Multidisipliner Di Era 4.0*.